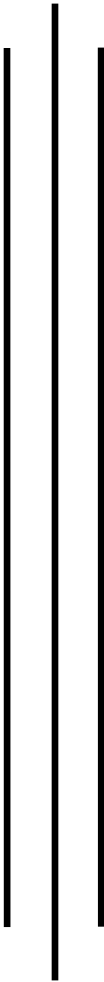


LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2027





RENCANA KERJA 2027

DINAS SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukkseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, Juli 2026
Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Batam



Zulkifli Aman, S.Sos, M.M

NIP. 19691109 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025	8
2.2 Evauasi Capaian SPM Tahun 2023 – 2025	9
2.3 Urusan Permasalahan Dan Isu Strategis Tahun 2027	10
2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	10
2.3.2 Permasalahan	19
2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis	19
2.4 Telaah Pokok Pokok Pikiran DPRD	20
2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 2027	21
3.2 Arah kebijakan yang Sudah Diselaraskan Dengan Renstra Perangkat Daerah	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2027	23
4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Untuk Pencapaian Progran Prioritas Daerah, kantribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM dan Tematik lainnya	66
BAB V KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	71
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	71
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	71
BAB VI PENUTUP	73
6.1 Catatan penting	73
6.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	74
6.3 Rencanan Tindak Lanjut	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Bidang Urusan berupa IKU Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025	9
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023 - 2025	9
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Rensra Perangkat Daerah	12
Tabel 2.5	Telaah Pokok Pokok Pikiran DPRD	20
Tabel 2.6	Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat	20
Tabel 3.1	Target Tujuan Dan Sasaraan Dinas Sosial	21
Tabel 3.2	Keselarasan Prioritas Nasional, Priorita Provinsi Kepulauan Riau, Proiritas Kota Batam	22
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027	24
	4.2.1 Dukungan Program renja Dinas Sosial	67
	4.2.2 Dukungan Proran RKPD tahun 2027 Kota Batam terhadap program strategis nasional	68
	4.2.3 Dukungan Program RKPD Kota Batam terhadap prioritas provinsi kepulauan riau tahun 2027	69
	4.2.4 Dukungan Program RKPD Kota Batam terhadap SPM	70
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama	71
Tabel 5.2	Indikator kinerja Kunci	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RKPD	2
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan Renja	3
Gambar 1.3	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

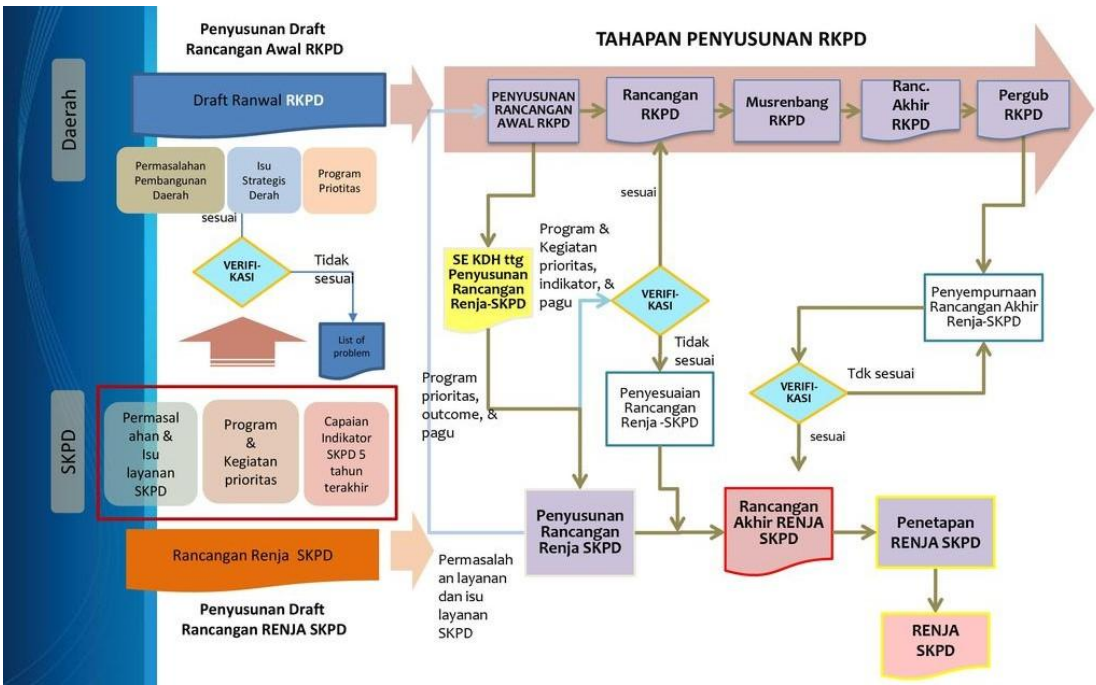
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

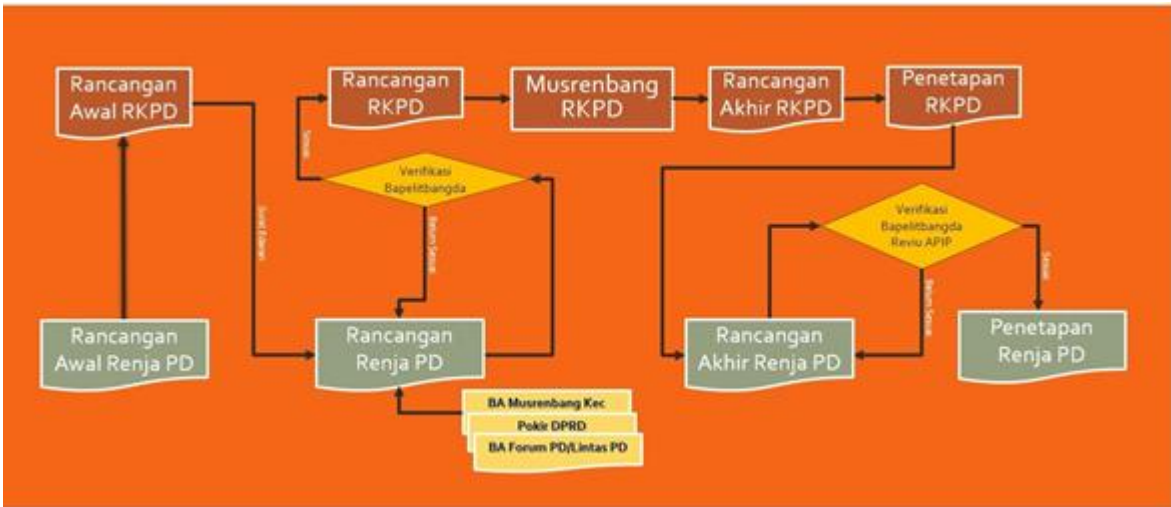
- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renja



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

The diagram illustrates the hierarchy of the Planning System (Sistem Perencanaan Pembangunan) in Indonesia, divided into Central Government (Pemerintah Pusat) and Regional Government (Pemerintah Daerah) levels.

Central Government (Pemerintah Pusat):

- RPJP NASIONAL** (National Medium-Term Development Plan) is the starting point, leading to **RENSTRA KL** (National Strategic Plan) via a "Pedoman" (Guideline).
- RENSTRA KL** leads to **RKA KL** (National Medium-Term Budget) via a "Pedoman" (Guideline).
- RKA KL** leads to **RIANCIAN APBN** (APBN Detail) via a "Pedoman" (Guideline).
- RIANCIAN APBN** leads to **APBN** (APBN) via a "Pedoman" (Guideline).
- APBN** leads to **RAPBN** (APBN) via a "Pedoman" (Guideline).
- RAPBN** leads to **RKA KL** via a "Pedoman" (Guideline).

Regional Government (Pemerintah Daerah):

- RPJP DAERAH** (Regional Medium-Term Development Plan) is derived from **RPJP NASIONAL** via a "Diturunkan" (Derived) relationship.
- RPJP DAERAH** leads to **RPMD DAERAH** (Regional Medium-Term Development Plan) via a "Pedoman" (Guideline).
- RPMD DAERAH** leads to **RENSTRA SKPD** (Regional Strategic Plan) via a "Pedoman" (Guideline).
- RENSTRA SKPD** leads to **RENJA SKPD** (Regional Strategic Plan) via a "Pedoman" (Guideline).
- RENJA SKPD** leads to **RKA SKPD** (Regional Medium-Term Budget) via a "Diturunkan" (Derived) relationship.
- RKA SKPD** leads to **RINCIAN APBD** (APBD Detail) via a "Pedoman" (Guideline).
- RINCIAN APBD** leads to **APBD** (APBD) via a "Pedoman" (Guideline).
- APBD** leads to **RAPBD** (APBD) via a "Pedoman" (Guideline).
- RAPBD** leads to **RKA SKPD** via a "Pedoman" (Guideline).

Legal Basis: UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Law No. 25 of 2004 on the Planning System).

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- 4

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standard Teknis Pelayanan Dasar pada Standard Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
 11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025 -2029

- (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam;
 13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1639);
 14. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun Anggaran 2027

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.

2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025.
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Urusan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan target capaian tahun 2025 terhadap realisasi kinerja pada tahun yang sama, serta mempertimbangkan baseline tahun 2024 sebagai dasar pengukuran perkembangan kinerja. Hasil evaluasi ini menjadi bahan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum capaian kinerja Bidang Urusan menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan beberapa indikator berhasil melampaui target

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan Pelayanan Terhadap PPKS memperoleh realisasi sebesar 59,5 dari target 50,00, dengan capaian kinerja 100%, sehingga termasuk kategori tinggi karena sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator mencapai target, sehingga secara umum pelaksanaan program yang mendukung indikator cakupan pelayanan terhadap PPKS telah berjalan sesuai rencana.
2. Persentase Kelembagaan Kelurahan yang aktif mencapai realisasi 100% dari target 95% dengan capaian kinerjanya mencapai 100%, sehingga berstatus tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan kelembagaan yang aktif (PKK, Posyandu, kader siaga) sudah optimal

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Cakupan Pelayanan Terhadap PPKS	Persentase	50%	50%	59.5%	100%	Tinggi	90%
2	Persentase Kelembagaan Kelurahan yang aktif	Persentase	95%	100%	100%	100%	Tinggi	100%

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen utama dalam mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, karena mencerminkan keterkaitan langsung antara tujuan, sasaran, program, dan hasil yang ingin dicapai. Melalui IKK, Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mencerminkan standar pelayanan minimal (SPM) urusan sosial yang dapat memantau tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Kinerja IKK Dinas Sosial mencapai target karena dilakukan sesuai dengan program dan sub kegiatan dan didukung dengan anggaran yang tersedia. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persentase	50%	50%	65.62%	100%	Sangat Tinggi	90%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (Indikator SPM)	Persentase	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023 – 2025

Evaluasi capaian SPM dari segi capaian penerima layanan dasar menunjukkan tren penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Di antara 5 indikator yang ada penurunan paling signifikan ada pada persentase Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti, persentase Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti, persentase Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, persentase Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti hal ini terjadi karena perbedaan target yang ditetapkan diantaranya Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat 2021 – 2026 dan Renstra 2025 – 2029

Meskipun capaian SPM pada 5 indikator ditahun 2025 sesuai target namun perlu ada upaya memastikan terpenuhinya mutu minimal layanan dasar yang terdiri dari mutu barang, dan mutu sumber daya manusia kesejahteraan sosial. Perlu dilakukan juga verifikasi dan validasi terhadap sasaran yang sudah ditetapkan agar sesuai dengan data sasaran eksisting di Kota Batam.

Mengingat bahwa angka sasaran tersebut menjadi denominator dalam penghitungan capaian layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar.

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	persentase	100%	100%	59.5%
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	persentase	100%	100%	51.9%
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	persentase	100%	100%	65.8%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	persentase	100%	100%	85.3%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten / kota	persentase	100%	100%	100%

2.3 Urusan Permasalahan Dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan Tahun 2027 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2026 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2027;

- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah melaksanakan sejumlah program melalui kegiatan yang ada dengan dana APBD Perubahan Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 56.089.114.083,00,- (Lima Puluh Enam Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 51.114.773.216,- (Lima Puluh Satu Miliar Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) atau persentase realisasi sebesar 91.13%

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Tabel : T.C - 29

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Niai Sakip PD	70.15	70.15	70.22	70.22	100 %	76.10	N/A	N/A
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.11	91.11	91.31	91.31	100 %	91.34	N/A	N/A
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %

1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa oenunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %

1.06.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; 2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; 3. Persentase Lansia terlantar yang terpenuhi	1. 50 % 2. 50 % 3. 50 % 4. 50 %	1. 50 % 2. 50 % 3. 50 % 4. 50 %	1. 50 % 2. 50 % 3. 50 % 4. 50 %	1. 59.5 % 2. 51.9 % 3. 65.8 % 4. 85.3 %	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 %	1. 60 % 2. 60 % 3. 60 % 4. 60 %	30 %	30 %

		kebutuhan dasarnya; 4. persentase tuna sosial terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya;								
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas (fisik dan mental) terlanter yang direhabilitasi 2. Persentase anak terlanter yang direhabilitasi; 2. Persentase lansia terlanter yang direhabilitasi; 4. Persentase tuna sosial yang direhabilitasi;	1. 50 % 2. 50 % 3. 50 % 4. 50 %	1. 50 % 2. 50 % 3. 50 % 4. 50 %	1. 50 % 2. 50 % 3. 50 % 4. 50 %	1. 59.5 % 2. 51.9 % 3. 65.8 % 4. 85.3 %	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 %	1. 60 % 2. 60 % 3. 60 % 4. 60 %	30 %	30 %
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	50 %	50 %

1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peneroma manfaat yang tervalidasi	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	93.75 %	93.75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %

2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang berprestasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %

2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
--------------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

2.3.2 Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
2. Pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial seperti pekerja sosial masyarakat, organisasi masyarakat, karang taruna, WKSBM, TKSM, belum dapat menunjukkan peran dan fungsinya secara nyata dalam rangka pengentasan PPKS.
3. Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum digunakan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dan indikator pengawasan.
4. Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana.
5. Kurangnya kesadaran, kemampuan, dan kemandirian PPKS.
6. Belum optimalnya akurasi data PPKS/PSKS di Kota Batam.
7. SDM pelaku pembangunan kesejahteraan, baik kuantitas maupun kualitasnya masih belum memadai.

2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugas fungsinya menghadapi beberapa tantangan dan memiliki beberapa peluang baik internal maupun eksternal. Berikut tantangan dan peluang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera.

a. Peluang

1. Jumlah penduduk yang cukup besar (+ 60% dari jumlah penduduk Propinsi Kepulauan Riau);
2. Adanya komitmen dan perhatian yang tinggi dari Kepala Daerah dan DPRD dalam menuntaskan permasalahan sosial.
3. Penguatan jaring pengaman social

4. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Dinas Sosial kabupaten/kota dan Kementerian Sosial.
 5. Dukungan dan Kolaborasi Pihak Luar
 6. Penguatan Sistem dan Inovasi
 7. Fokus Program Produktif
- b. Tantangan
1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi;
 2. Banyaknya jumlah PPKS, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah.
 3. Masih rendahnya partisipasi PSKS dalam penanganan PPKS.
 4. Masih kurangnya sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 5. Kompleksitas Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Kemiskinan:
 6. Keterbatasan Internal dan Teknis:

2.4 Telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil inventarisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Batam Tahun 2026, terdapat 1 usulan program, kegiatan, maupun subkegiatan yang secara langsung menjadi kewenangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027 tetap mengacu pada target kinerja Renstra, prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi kinerja.

Tabel 2.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PENGUSUL	USULAN	URAIAN PEKERJAAN	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	OPD TUJUAN AKHIR
1	Dandis Rajagukguk	Bantuan Kursi Roda	Alat bantu untuk penyandang disabilitas	Se kota batam	disetujui	20	orang	Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Tabel 2.6 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Adapun tujuan dari Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah:

“Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan pemberdayaan kelembagaan kelurahan”

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2027
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan pemberdayaan kelembagaan kelurahan	Cakupan pelayanan terhadap PPKS	70
		Persentase kelembagaan kelurahan yang aktif	97
1	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	70
2	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan dan Administrasi Kelurahan yang Baik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	100
3	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	70
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	92

3.2 Arah Kebijakan Yang Sudah Diselaraskan Dengan Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan Renstra Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat 2025-2029 merupakan rangkaian kinerja terencana yang diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

tahun 2025-2029. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, serta perbaikan kinerja Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan serta kebutuhan masyarakat di Kota Batam. Fokus utama arah kebijakan tersebut yaitu Peningkatan kemandirian keluarga miskin difokuskan pada pemberian bantuan ekonomi produktif.

Optimalisasi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Batam	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PP 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	<i>Optimalisasi Pengentasan kemiskinan</i>

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2027

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 merupakan tahun ke 3 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029 Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan 8 (Delapan) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dengan 44 (Empat Puluh Empat) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM
TAHUN 2027**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(15)	(16)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			66.316.248.617,00				65.717.638.077,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.692.972.053,00				35.323.680.336,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			40.692.972.053,00				35.323.680.336,00
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.891.395.400,00				16.124.807.758,00
	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan</i>			14.684.676.001,00				16.124.807.758,00
		Indeks pelayanan kesekretariatan PD	91.37 Nilai	14.684.676.001,00			91.40 Nilai	16.124.807.758,00
		Nilai SAKIP PD	78.20 Nilai	14.684.676.001,00			80.30 Nilai	16.124.807.758,00

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			91.354.100,00				220.813.500,00
	Tersusunnya Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi DINSOS			91.354.100,00				220.813.500,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	91.354.100,00			2 Dokumen	220.813.500,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			91.354.100,00				220.813.500,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	91.354.100,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	220.813.500,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.706.603.003,00				12.933.886.192,00
	Terlaksananya layanan administrasi keuangan DINSOS			11.706.603.003,00				12.933.886.192,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	127.340.000,00			12 Dokumen	137.340.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	11.579.263.003,00			60 Orang/bulan	12.796.546.192,00

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.579.263.003,00				12.796.546.192,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	11.579.263.003,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	60 Orang/bulan	12.796.546.192,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			127.340.000,00				137.340.000,00
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	127.340.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	137.340.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			166.367.000,00				220.000.000,00
	Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN DINSOS			166.367.000,00				220.000.000,00
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	66.367.000,00			60 Paket	120.000.000,00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00			10 Orang	100.000.000,00

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			66.367.000,00				120.000.000,00
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	66.367.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 Paket	120.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.000.000,00				100.000.000,00
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Orang	100.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			367.866.100,00				482.097.688,00
	Terlaksananya layanan administrasi umum DINSOS			367.866.100,00				482.097.688,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	136.950.000,00			12 Laporan	209.206.580,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.528.800,00			7 Paket	37.806.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00			1 Paket	30.773.688,00

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.387.300,00			3 Paket	204.310.920,00
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000,00				30.773.688,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	30.773.688,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.387.300,00				204.310.920,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.387.300,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	204.310.920,00

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.528.800,00				37.806.500,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.528.800,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Paket	37.806.500,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			136.950.000,00				209.206.580,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	136.950.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	209.206.580,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			545.676.300,00				1.070.987.036,00
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD DINSOS			545.676.300,00				1.070.987.036,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	248.011.700,00			30 Unit	52.812.870,00

		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00			1 Unit	600.000.000,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	297.664.600,00			30 Unit	118.174.166,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00			0 Unit	300.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00				600.000.000,00
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	600.000.000,00
	Pengadaan Mebel			248.011.700,00				52.812.870,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	248.011.700,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	52.812.870,00

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			297.664.600,00				118.174.166,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	297.664.600,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	118.174.166,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00				300.000.000,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	300.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			360.000.000,00				411.387.900,00
	Tersedianya jasa penunjang urusan DINSOS			360.000.000,00				411.387.900,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	1 Laporan	360.000.000,00			1 Laporan	411.387.900,00

		Air dan Listrik yang Disediakan						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			360.000.000,00				411.387.900,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	411.387.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.653.528.897,00				785.635.442,00
	Terlaksananya pemeliharaan BMD DINSOS			1.653.528.897,00				785.635.442,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	274.054.000,00			7 Unit	359.479.142,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.840.000,00			1 Unit	49.706.800,00

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	149.025.000,00			150 Unit	195.124.500,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.185.609.897,00			1 Unit	181.325.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			44.840.000,00				49.706.800,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.840.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	49.706.800,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			238.829.000,00				359.479.142,00

	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	238.829.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	359.479.142,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			110.160.000,00				195.124.500,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	110.160.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Unit	195.124.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.052.980.498,00				181.325.000,00

	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.052.980.498,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	181.325.000,00
2,	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.862.979.102,00				2.119.022.549,00
	<i>Meningkatnya kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dan meningkatkan pelayanan sosial yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan</i>			1.862.979.102,00				2.119.022.549,00
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	85 %	1.862.979.102,00			90 %	2.119.022.549,00
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00				60.000.000,00
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00				60.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	30.000.000,00			12 Dokumen	60.000.000,00

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			30.000.000,00				60.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	30.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	60.000.000,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.832.979.102,00				2.059.022.549,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.832.979.102,00				2.059.022.549,00
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	1.651.235.702,00			30 Lembaga	1.259.452.277,00
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 Orang	78.139.000,00			80 Orang	591.675.223,00

		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	103.604.400,00			100 Orang	207.895.049,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			1.651.235.702,00				1.259.452.277,00
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Lembaga	1.651.235.702,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Lembaga	1.259.452.277,00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			103.604.400,00				207.895.049,00

	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	103.604.400,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	207.895.049,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			78.139.000,00				591.675.223,00
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 Orang	78.139.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang	591.675.223,00
3,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
	<i>Meningkatnya kualitas hidup bagi lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial</i>			<i>1.852.120.050,00</i>				<i>2.209.651.566,00</i>
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70 %	970.573.400,00			80 %	1.012.750.930,00

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas dan tuna sosial			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00			40 Orang	70.000.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100.000.000,00			40 Orang	70.000.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	72.375.000,00			35 Orang	90.589.070,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00			40 Orang	70.000.000,00

		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	798.198.400,00			100 Orang	852.161.860,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar.			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00			40 Orang	70.000.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100.000.000,00			40 Orang	70.000.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	72.375.000,00			35 Orang	90.589.070,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00			40 Orang	70.000.000,00

		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	798.198.400,00			100 Orang	852.161.860,00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			798.198.400,00				852.161.860,00
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	798.198.400,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	852.161.860,00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			0,00				70.000.000,00

	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	70.000.000,00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			100.000.000,00				70.000.000,00
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	70.000.000,00
	Pemberian Layanan Kedaruratan			72.375.000,00				90.589.070,00
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	72.375.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Orang	90.589.070,00

	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			0,00				70.000.000,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	70.000.000,00
	<i>Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial</i>			1.852.120.050,00				2.209.651.566,00
		Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70 %	881.546.650,00			80 %	1.266.900.636,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas dan tuna sosial			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	217.762.100,00			72 Orang	323.053.060,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	135.117.500,00			20 Orang	155.497.100,00

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	323.371.950,00			100 Orang	433.481.870,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	109.894.100,00			80 Orang	284.868.606,00
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	95.401.000,00			40 Orang	70.000.000,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar.			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	217.762.100,00			72 Orang	323.053.060,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	135.117.500,00			20 Orang	155.497.100,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100 Orang	323.371.950,00			100 Orang	433.481.870,00

		Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	109.894.100,00			80 Orang	284.868.606,00
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	95.401.000,00			40 Orang	70.000.000,00
	Penyediaan Permakanan			109.894.100,00				284.868.606,00
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	109.894.100,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang	284.868.606,00
	Penyediaan Sandang			95.401.000,00				70.000.000,00

	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	95.401.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	70.000.000,00
	Penyediaan Alat Bantu			135.117.500,00				155.497.100,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	135.117.500,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Orang	155.497.100,00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			323.371.950,00				433.481.870,00

	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	323.371.950,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	433.481.870,00
	Pemberian Layanan Rujukan			217.762.100,00				323.053.060,00
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	217.762.100,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72 Orang	323.053.060,00
4,	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			20.946.407.500,00				12.391.554.449,00
	<i>Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan</i>			20.946.407.500,00				12.391.554.449,00
		Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 %	20.946.407.500,00			100 %	12.391.554.449,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			20.946.407.500,00				12.391.554.449,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			20.946.407.500,00				12.391.554.449,00

		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	977.498.900,00			31320 Orang	1.338.545.669,00
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	19.968.908.600,00			6000 Orang	11.053.008.780,00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			977.498.900,00				1.338.545.669,00
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	977.498.900,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31320 Orang	1.338.545.669,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			19.968.908.600,00				11.053.008.780,00

	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	19.968.908.600,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6000 Orang	11.053.008.780,00
5,	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			722.604.800,00				1.847.812.064,00
	<i>Menurunnya korban bencana alam dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>			622.604.800,00				1.547.812.064,00
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	622.604.800,00			100 %	1.547.812.064,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			722.604.800,00				1.847.812.064,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			722.604.800,00				1.847.812.064,00
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000,00			500 Orang	150.000.000,00

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	73.060.000,00			500 Orang	773.060.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000,00			500 Orang	150.000.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	499.544.800,00			800 Orang	624.752.064,00
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000,00			500 Orang	150.000.000,00
	Penyediaan Makanan			499.544.800,00				624.752.064,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	499.544.800,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800 Orang	624.752.064,00

	Penyediaan Sandang			73.060.000,00				773.060.000,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	73.060.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	773.060.000,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			50.000.000,00				150.000.000,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	150.000.000,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial			50.000.000,00				150.000.000,00
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	150.000.000,00

	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			50.000.000,00				150.000.000,00
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	50.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	150.000.000,00
6,	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			624.184.600,00				420.831.950,00
	<i>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan</i>			624.184.600,00				420.831.950,00
		Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik	93.4 %	624.184.600,00			93.5 %	420.831.950,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			624.184.600,00				420.831.950,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			624.184.600,00				420.831.950,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	150.000.000,00			12 Laporan	130.680.000,00

		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Makam	174.184.600,00			50 Makam	290.151.950,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			174.184.600,00				290.151.950,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Makam	174.184.600,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Batu Aji Kelurahan Bukit Tempayan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Makam	290.151.950,00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			150.000.000,00				130.680.000,00

	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	150.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	130.680.000,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			624.184.600,00				420.831.950,00
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	300.000.000,00			-	0,00
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			300.000.000,00				0,00
	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Batu Aji Kelurahan Bukit Tempayan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0,00

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.623.276.564,00				30.393.957.741,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			25.623.276.564,00				30.393.957.741,00
7,	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			217.575.700,00				283.371.836,00
	<i>Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa</i>			217.575.700,00				283.371.836,00
		Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	100 Persentase	217.575.700,00			100 Persentase	283.371.836,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			217.575.700,00				283.371.836,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			217.575.700,00				283.371.836,00
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	217.575.700,00			3 Dokumen	283.371.836,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			217.575.700,00				283.371.836,00

	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	217.575.700,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	283.371.836,00
8,	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			25.405.700.864,00				30.110.585.905,00
	<i>meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial</i>			25.405.700.864,00				29.810.585.905,00
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 Persentase	25.405.700.864,00			100 Persentase	29.810.585.905,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.405.700.864,00				30.110.585.905,00

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.405.700.864,00				30.110.585.905,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	785.865.200,00			12 Dokumen	300.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	0,00			12 Dokumen	300.000.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	446.703.100,00			2 Laporan	573.371.810,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	168.246.000,00			3 Laporan	363.503.965,00

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	24.004.886.564,00			711 Lembaga	28.473.710.130,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Unit	0,00			6 Unit	100.000.000,00
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			0,00				300.000.000,00

	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	0,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	300.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			24.004.886.564,00				28.473.710.130,00
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	24.004.886.564,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	711 Lembaga	28.473.710.130,00
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat			0,00				100.000.000,00

	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
	Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	0,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Unit	100.000.000,00
	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			168.246.000,00				363.503.965,00
	Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	168.246.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	363.503.965,00
	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			446.703.100,00				573.371.810,00

	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	446.703.100,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	573.371.810,00
	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			785.865.200,00				300.000.000,00
	Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	785.865.200,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	300.000.000,00
	UPTD P2PMKS NILAM SURI			1.014.120.899,00				1.276.620.180,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.014.120.899,00				1.276.620.180,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			1.014.120.899,00				1.276.620.180,00
9,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.891.395.400,00				16.124.807.758,00
	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan</i>			206.719.399,00				0,00

	kinerja layanan kesekretariatan							
		Indeks pelayanan kesekretariatan PD	91.37 Nilai	206.719.399,00			91.40 Nilai	0,00
		Nilai SAKIP PD	78.20 Nilai	206.719.399,00			80.30 Nilai	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.653.528.897,00				785.635.442,00
	Terlaksananya pemeliharaan BMD DINSOS			1.653.528.897,00				785.635.442,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	274.054.000,00			7 Unit	359.479.142,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	149.025.000,00			150 Unit	195.124.500,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.185.609.897,00			1 Unit	181.325.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.225.000,00				0,00

	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.225.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Nongsa Kelurahan Sambau 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			38.865.000,00				0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	38.865.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Nongsa Kelurahan Sambau 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Unit	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			132.629.399,00				0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	132.629.399,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Nongsa Kelurahan Sambau 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	0,00

10,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
	<i>Meningkatnya kualitas hidup bagi lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial</i>			807.401.500,00				1.276.620.180,00
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70 %	807.401.500,00			80 %	1.276.620.180,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas dan tuna sosial			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	807.401.500,00			100 Orang	1.276.620.180,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar.			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	807.401.500,00			100 Orang	1.276.620.180,00

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			807.401.500,00				1.276.620.180,00
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	525 Orang	807.401.500,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Nongsa Kelurahan Sambau 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	1.276.620.180,00
	<i>Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial</i>			807.401.500,00				1.276.620.180,00
	J U M L A H			67.330.369.516,00	66.994.258.257,00			

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah, kontribusi Terhadap Pencapaian Target Nasional, Pencapaian SPM dan Tematik Lainnya

Rencana kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat LKota Batam Tahun 2027 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Penyusunan rencana kerja tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan arah kebijakan nasional, daerah, dan kebutuhan pelayanan Sosial masyarakat sehingga setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan yang jelas terhadap target pembangunan sosial secara berjenjang. Sebagai tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025–2029, pada Tahun 2027 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melaksanakan 8 Program 15 Kegiatan 47 Sub Kegiatan yang didukung dengan pagu pendanaan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat. Program-program tersebut meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat, dan Masyarakat hukum adat. Komposisi program dan pendanaan tersebut merupakan instrumen utama dalam mencapai target indikator kinerja daerah dan peningkatan kualitas pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.1, dukungan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terhadap prioritas pembangunan nasional diarahkan pada Prioritas Nasional 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengalokasian pendanaan terbesar pada Program

Rehabilitasi Siosial. Arah pendanaan ini menunjukkan bahwa peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan Sosial tetap menjadi prioritas utama di Kota Batam.

Tabel 4.2.1 Dukungan Program Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Prioritas Nasional	Dukungan Program Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2027	Pagu Tahun 2027
Prioritas Nasional 4		
perkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	Program rehabilitasi Sosial	Rp. 2,659,521,550.00,-

Pada Tabel 4.2.2 terlihat bahwa program-program Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Program Strategis Nasional (ProSN) melalui berbagai indikator bidang Sosial, antara lain Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar, Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial, persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, Target-target tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendukung agenda transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya penguatan pelayanan dalam bidang sosial

Tabel 4.2.2 Dukungan Program RKPD Tahun 2027 Kota Batam terhadap Program Strategis Nasional (ProSN)

ProSN	Proyek / Kegiatan	Program Pada SKPD	Indikator Program 2027	Target 2027	Pagu Program pada RKPD 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	20.946.407.500	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
		Program pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	85%	1.862.979.102	
		Program Rehabilitasi Sosial	persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70%	2.659.521.550	

Selain mendukung target nasional, rencana kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2027 juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, khususnya Prioritas 2 yaitu Pengembangan Konektivitas Antar wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana dan Prioritas 3 yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya

Melayu, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.2.3. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana, Program Administrasi Pemerintahan Desa, program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Lembaga Adat Masyarakat hukum Adat. Pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat nilai sosial masyarakat, penguatan kapasitas tenaga pekerja sosial, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Tabel. 4.2.3 Dukungan Progran RKPD Kota Batam Terhadap Proiritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2027	Dukungan Progran RKPD Kota Batam Tahun 2027
Prioritas 2 Pengembangan Konektivitas Antar wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana
Prioritas 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga 2. Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tetap menjadi prioritas utama penyelenggaraan urusan Sosial pada Tahun 2027. Sebagaimana tercantum pada Tabel 4.2.4, seluruh 5 jenis pelayanan dasar SPM Sosial didukung melalui Program rehabilitasi Sosial Dan Program Penanganan Bencana Pengalokasian sumber daya pada program tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan pelayanan sesuai standar, memperbaiki mutu layanan, serta meningkatkan capaian indikator SPM yang masih memerlukan perhatian berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027 menunjukkan keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, target pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah serta didukung dengan pendanaan yang proporsional, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat berkomitmen meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan pemerataan pelayanan bidang sosial sehingga mampu mewujudkan masyarakat Kota Batam yang lebih Sejahtera dalam urusan sosial

Tabel 4.2.4 Dukungan program RKPD Kota Batam tahun 2027 terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	SPM	PROGRAM RKPD 2027	PAGU INDIKATIF RKPD 2027
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	2,659,521,550.00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;	Program Rehabilitasi Sosial	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan seelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	Program Penanganan Bencana	722.604.800.00

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2027

Penyusunan indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis tahun 2026 untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2027 yang sekaligus menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 1 (Satu) tahun kedepan

Tabel 5.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Tahun					
			2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan Pelayanan Terhadap PPKS	Persentase	100	50	60	70	80	90	100
2	Persentase Kelembagaan Kelurahan yang aktif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

5.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis suatu instansi pemerintah dalam periode tertentu, baik dalam konteks Renstra Perangkat Daerah maupun RPJMD.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen utama dalam mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, karena mencerminkan keterkaitan langsung antara tujuan, sasaran, program, dan hasil yang ingin dicapai. Melalui IKK, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat memantau tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran strategis, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk periode tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi	Target
			2025	2027
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persentase	65.62	70
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (Indikator SPM)	Persentase	100	100

Lampiran Ranhir 2027

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM
TAHUN 2027

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
			TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(15)	(16)
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			66.316.248.617,00				65.717.638.077,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.692.972.053,00				35.323.680.336,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			40.692.972.053,00				35.323.680.336,00
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.891.395.400,00				16.124.807.758,00
	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan</i>			<i>14.684.676.001,00</i>				<i>16.124.807.758,00</i>
		Indeks pelayanan kesekretariatan PD	91.37 Nilai	14.684.676.001,00			91.40 Nilai	16.124.807.758,00
		Nilai SAKIP PD	78.20 Nilai	14.684.676.001,00			80.30 Nilai	16.124.807.758,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			91.354.100,00				220.813.500,00

	Tersusunnya Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi DINSOS			91.354.100,00				220.813.500,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	91.354.100,00			2 Dokumen	220.813.500,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			91.354.100,00				220.813.500,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	91.354.100,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	220.813.500,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.706.603.003,00				12.933.886.192,00
	Terlaksananya layanan administrasi keuangan DINSOS			11.706.603.003,00				12.933.886.192,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	127.340.000,00			12 Dokumen	137.340.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	11.579.263.003,00			60 Orang/bulan	12.796.546.192,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.579.263.003,00				12.796.546.192,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	11.579.263.003,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	60 Orang/bulan	12.796.546.192,00

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			127.340.000,00				137.340.000,00
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	127.340.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	137.340.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			166.367.000,00				220.000.000,00
	Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN DINSOS			166.367.000,00				220.000.000,00
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	66.367.000,00			60 Paket	120.000.000,00
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00			10 Orang	100.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			66.367.000,00				120.000.000,00
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	66.367.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 Paket	120.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.000.000,00				100.000.000,00
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Orang	100.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			367.866.100,00				482.097.688,00
	Terlaksananya layanan administrasi umum DINSOS			367.866.100,00				482.097.688,00

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	136.950.000,00			12 Laporan	209.206.580,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.528.800,00			7 Paket	37.806.500,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00			1 Paket	30.773.688,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.387.300,00			3 Paket	204.310.920,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000,00				30.773.688,00
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	30.773.688,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.387.300,00				204.310.920,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.387.300,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	204.310.920,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.528.800,00				37.806.500,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.528.800,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Paket	37.806.500,00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			136.950.000,00				209.206.580,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	136.950.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	209.206.580,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			545.676.300,00				1.070.987.036,00
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD DINSOS			545.676.300,00				1.070.987.036,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	248.011.700,00			30 Unit	52.812.870,00
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00			1 Unit	600.000.000,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	297.664.600,00			30 Unit	118.174.166,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00			0 Unit	300.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00				600.000.000,00
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	600.000.000,00
	Pengadaan Mebel			248.011.700,00				52.812.870,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	248.011.700,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	52.812.870,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			297.664.600,00				118.174.166,00

	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	297.664.600,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit	118.174.166,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00				300.000.000,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	300.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			360.000.000,00				411.387.900,00
	Tersedianya jasa penunjang urusan DINSOS			360.000.000,00				411.387.900,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	360.000.000,00			1 Laporan	411.387.900,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00			0 Laporan	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			360.000.000,00				411.387.900,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	411.387.900,00

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00				0,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Laporan	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.653.528.897,00				785.635.442,00
	Terlaksananya pemeliharaan BMD DINSOS			1.653.528.897,00				785.635.442,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	274.054.000,00			7 Unit	359.479.142,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.840.000,00			1 Unit	49.706.800,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	149.025.000,00			150 Unit	195.124.500,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.185.609.897,00			1 Unit	181.325.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			44.840.000,00				49.706.800,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.840.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	49.706.800,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			238.829.000,00				359.479.142,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	238.829.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	359.479.142,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			110.160.000,00				195.124.500,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	110.160.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Sekupang Kelurahan Sungai Harapan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Unit	195.124.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.052.980.498,00				181.325.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.052.980.498,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	181.325.000,00
2,	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.862.979.102,00				2.119.022.549,00
	<i>Meningkatnya kualitas kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dan dalam menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan</i>			1.862.979.102,00				2.119.022.549,00
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	85 %	1.862.979.102,00			90 %	2.119.022.549,00

	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00				60.000.000,00
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00				60.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	30.000.000,00			12 Dokumen	60.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			30.000.000,00				60.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	30.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	60.000.000,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.832.979.102,00				2.059.022.549,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.832.979.102,00				2.059.022.549,00
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	1.651.235.702,00			30 Lembaga	1.259.452.277,00
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 Orang	78.139.000,00			80 Orang	591.675.223,00

		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	103.604.400,00			100 Orang	207.895.049,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			1.651.235.702,00				1.259.452.277,00
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Lembaga	1.651.235.702,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Lembaga	1.259.452.277,00
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			103.604.400,00				207.895.049,00
	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	103.604.400,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	207.895.049,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			78.139.000,00				591.675.223,00
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 Orang	78.139.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang	591.675.223,00
3,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00

	Meningkatnya kualitas hidup bagi lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial			1.852.120.050,00				2.209.651.566,00
		Persentase Lanjut Usia Terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70 %	970.573.400,00			80 %	1.012.750.930,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas dan tuna sosial			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00			40 Orang	70.000.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100.000.000,00			40 Orang	70.000.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	72.375.000,00			35 Orang	90.589.070,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00			40 Orang	70.000.000,00
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	798.198.400,00			100 Orang	852.161.860,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter.			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00			40 Orang	70.000.000,00

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100.000.000,00			40 Orang	70.000.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	72.375.000,00			35 Orang	90.589.070,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00			40 Orang	70.000.000,00
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	798.198.400,00			100 Orang	852.161.860,00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			798.198.400,00				852.161.860,00
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	798.198.400,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	852.161.860,00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			0,00				70.000.000,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	70.000.000,00

	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			100.000.000,00				70.000.000,00
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	100.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	70.000.000,00
	Pemberian Layanan Kedaruratan			72.375.000,00				90.589.070,00
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	72.375.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Orang	90.589.070,00
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			0,00				70.000.000,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	70.000.000,00
	<i>Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial</i>			1.852.120.050,00				2.209.651.566,00
		Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70 %	881.546.650,00			80 %	1.266.900.636,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas dan tuna sosial			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	217.762.100,00			72 Orang	323.053.060,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	135.117.500,00			20 Orang	155.497.100,00

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	323.371.950,00			100 Orang	433.481.870,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	109.894.100,00			80 Orang	284.868.606,00
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	95.401.000,00			40 Orang	70.000.000,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar.			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	217.762.100,00			72 Orang	323.053.060,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	135.117.500,00			20 Orang	155.497.100,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	323.371.950,00			100 Orang	433.481.870,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	109.894.100,00			80 Orang	284.868.606,00
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	95.401.000,00			40 Orang	70.000.000,00
	Penyediaan Permakanan			109.894.100,00				284.868.606,00
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	109.894.100,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang	284.868.606,00

	Penyediaan Sandang			95.401.000,00				70.000.000,00
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	95.401.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	70.000.000,00
	Penyediaan Alat Bantu			135.117.500,00				155.497.100,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	135.117.500,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Orang	155.497.100,00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			323.371.950,00				433.481.870,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	323.371.950,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	433.481.870,00
	Pemberian Layanan Rujukan			217.762.100,00				323.053.060,00
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	217.762.100,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72 Orang	323.053.060,00
4,	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			20.946.407.500,00				12.391.554.449,00
	<i>Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan</i>			20.946.407.500,00				12.391.554.449,00
		Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 %	20.946.407.500,00			100 %	12.391.554.449,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			20.946.407.500,00				12.391.554.449,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			20.946.407.500,00				12.391.554.449,00
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	977.498.900,00			31320 Orang	1.338.545.669,00

		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	19.968.908.600,00			6000 Orang	11.053.008.780,00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			977.498.900,00				1.338.545.669,00
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31320 Orang	977.498.900,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31320 Orang	1.338.545.669,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			19.968.908.600,00				11.053.008.780,00
	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	19.968.908.600,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6000 Orang	11.053.008.780,00
5,	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			722.604.800,00				1.847.812.064,00
	Menurunnya korban bencana alam dan / non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			622.604.800,00				1.547.812.064,00
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	622.604.800,00			100 %	1.547.812.064,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			722.604.800,00				1.847.812.064,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			722.604.800,00				1.847.812.064,00
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000,00			500 Orang	150.000.000,00

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	73.060.000,00			500 Orang	773.060.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000,00			500 Orang	150.000.000,00
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	499.544.800,00			800 Orang	624.752.064,00
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000,00			500 Orang	150.000.000,00
	Penyediaan Makanan			499.544.800,00				624.752.064,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	499.544.800,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800 Orang	624.752.064,00
	Penyediaan Sandang			73.060.000,00				773.060.000,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	73.060.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	773.060.000,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			50.000.000,00				150.000.000,00
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	150.000.000,00

	Pelayanan Dukungan Psikososial			50.000.000,00				150.000.000,00
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	50.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	150.000.000,00
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			50.000.000,00				150.000.000,00
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	50.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	150.000.000,00
6,	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			624.184.600,00				420.831.950,00
	<i>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana taman makam pahlawan</i>			624.184.600,00				420.831.950,00
		Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik	93,4 %	624.184.600,00			93,5 %	420.831.950,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			624.184.600,00				420.831.950,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			624.184.600,00				420.831.950,00
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	150.000.000,00			12 Laporan	130.680.000,00
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Makam	174.184.600,00			50 Makam	290.151.950,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			174.184.600,00				290.151.950,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50 Makam	174.184.600,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Batu Aji Kelurahan Bukit Tempayan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Makam	290.151.950,00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			150.000.000,00				130.680.000,00

	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	150.000.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	130.680.000,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			624.184.600,00				420.831.950,00
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	300.000.000,00			-	0,00
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			300.000.000,00				0,00
	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Batu Aji Kelurahan Bukit Tempayan 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.623.276.564,00				30.393.957.741,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			25.623.276.564,00				30.393.957.741,00
7,	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			217.575.700,00				283.371.836,00
	<i>Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa</i>			<i>217.575.700,00</i>				<i>283.371.836,00</i>
		Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	100 Persentase	217.575.700,00			100 Persentase	283.371.836,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			217.575.700,00				283.371.836,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			217.575.700,00				283.371.836,00
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	217.575.700,00			3 Dokumen	283.371.836,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			217.575.700,00				283.371.836,00

	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	217.575.700,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	283.371.836,00
8,	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			25.405.700.864,00				30.110.585.905,00
	<i>meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sosial</i>			<i>25.405.700.864,00</i>				<i>29.810.585.905,00</i>
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 Persentase	25.405.700.864,00			100 Persentase	29.810.585.905,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.405.700.864,00				30.110.585.905,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.405.700.864,00				30.110.585.905,00
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	785.865.200,00			12 Dokumen	300.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	0,00			12 Dokumen	300.000.000,00

		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	446.703.100,00			2 Laporan	573.371.810,00
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	168.246.000,00			3 Laporan	363.503.965,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	24.004.886.564,00			711 Lembaga	28.473.710.130,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Unit	0,00			6 Unit	100.000.000,00
	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			0,00				300.000.000,00
	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	0,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	300.000.000,00

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			24.004.886.564,00				28.473.710.130,00
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711 Lembaga	24.004.886.564,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	711 Lembaga	28.473.710.130,00
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			0,00				100.000.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	0,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Unit	100.000.000,00
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			168.246.000,00				363.503.965,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	168.246.000,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	363.503.965,00

	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			446.703.100,00				573.371.810,00
	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	446.703.100,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	573.371.810,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			785.865.200,00				300.000.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	785.865.200,00	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	300.000.000,00
	UPTD P2PMKS NILAM SURI			1.014.120.899,00				1.276.620.180,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.014.120.899,00				1.276.620.180,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			1.014.120.899,00				1.276.620.180,00
9,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.891.395.400,00				16.124.807.758,00
	<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan</i>			206.719.399,00				0,00
		Indeks pelayanan kesekretariatan PD	91.37 Nilai	206.719.399,00			91.40 Nilai	0,00
		Nilai SAKIP PD	78.20 Nilai	206.719.399,00			80.30 Nilai	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.653.528.897,00				785.635.442,00
	Terlaksananya pemeliharaan BMD DINSOS			1.653.528.897,00				785.635.442,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	274.054.000,00			7 Unit	359.479.142,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	149.025.000,00			150 Unit	195.124.500,00

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.185.609.897,00			1 Unit	181.325.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			35.225.000,00				0,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.225.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Nongsa Kelurahan Sambau 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			38.865.000,00				0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	38.865.000,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Nongsa Kelurahan Sambau 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Unit	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			132.629.399,00				0,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	132.629.399,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Nongsa Kelurahan Sambau 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	0,00
10,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
	<i>Meningkatnya kualitas hidup bagi lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial</i>			<i>807.401.500,00</i>				<i>1.276.620.180,00</i>
		Persentase Lanjut Usia Terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70 %	807.401.500,00			80 %	1.276.620.180,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00

	Rehabilitasi Sosial Dasar penyanggandisabilitas dan tuna sosial			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	807.401.500,00			100 Orang	1.276.620.180,00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar.			2.659.521.550,00				3.696.271.746,00
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	807.401.500,00			100 Orang	1.276.620.180,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			807.401.500,00				1.276.620.180,00
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	525 Orang	807.401.500,00	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Kecamatan Nongsa Kelurahan Sambau 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	1.276.620.180,00
	<i>Meningkatnya Kualitas Hidup bagi Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui layanan rehabilitasi sosial</i>			<i>807.401.500,00</i>				<i>1.276.620.180,00</i>
	J U M L A H			67.330.369.516,00	66.994.258.257,00			

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam
Periode Tahun 2026 - 2030

2026-07-07

NSPK Dan Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan pemberdayaan kelembagaan kelurahan	Cakupan pelayanan terhadap PPKS	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	100
		Persentase kelembagaan kelurahan yang aktif	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	100
	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	PERSENTASE	50	50	60	70	80	90	100	100
	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan dan Administrasi Kelurahan yang Baik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	100
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Poin	91	91	91.5	92	92.5	93	93.5	93

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

6.1 Catatan Penting

Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 8 (Delapan) program, 15 (Lima Belas) kegiatan, 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 67.330.369.516,- (Enam Puluh tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga puluh Juta Tiga Ratus Enam

Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah). Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 – 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Bidang Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.

WALI KOTA BATAM


AMSAKAR ACHMAD